

**INKLUSI DAN KEADILAN GENDER DI SMA SWASTA DKI JAKARTA:
Studi Terhadap Kurikulum, Budaya Sekolah, Dan Praktik Edukatif**

Eli Kamaliyah¹, M. Bazuki Rachmad², Muhamad Unang³, Tri Mai Suci⁴
elikamaliyah87@gmail.com¹, mbazukirachmad8@gmail.com², mochunangalbantani@gmail.com³,
trimaisuci@gmail.com⁴

Universitas Indraprasta PGRI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip inklusi dan keadilan gender di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta di DKI Jakarta, dengan fokus pada tiga aspek utama: kurikulum formal dan tersembunyi, budaya sekolah, serta praktik pedagogis guru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (mixed methods) dengan desain eksplanatori sekuensial. Tahap kuantitatif melibatkan survei terhadap 150 guru dari 30 SMA swasta untuk memetakan persepsi dan pengetahuan dasar. Tahap kualitatif dilakukan melalui studi kasus mendalam di tiga sekolah yang mewakili variasi visi (agama, nasional plus, dan umum), dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara deklaratif, sekolah mengaku telah mengintegrasikan nilai kesetaraan dalam kegiatan pembelajaran. Namun, secara substantif, keadilan gender belum menjadi kerangka kerja yang transformatif. Kurikulum tersembunyi justru memperkuat stereotip melalui pembagian peran dalam organisasi siswa, pilihan ekstrakurikuler, dan interaksi guru-siswa. Budaya sekolah yang maskulin terlihat dalam dominasi laki-laki di posisi kepemimpinan OSIS dan dalam disiplin yang lebih longgar terhadap pelanggaran oleh siswa laki-laki. Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pendidikan inklusif di tingkat nasional dengan implementasi di tingkat mikro yang masih dipengaruhi bias gender personal pendidik dan tekanan konservatisme orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan intervensi sistematis, tidak hanya pada pelatihan guru, tetapi juga pada reformasi kebijakan sekolah, penguatan peran konselor, dan penciptaan mekanisme akuntabilitas untuk mewujudkan keadilan gender yang substantif di SMA swasta Jakarta.

Kata Kunci: Inklusi Gender, Keadilan Gender, Pendidikan Menengah, Kurikulum Tersembunyi, Budaya Sekolah, Mixed Methods.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen krusial dalam mendekonstruksi ketimpangan gender dan membangun tatanan masyarakat yang inklusif. Sekolah, sebagai miniatur masyarakat, memiliki peran ganda: mereproduksi nilai-nilai sosial yang ada sekaligus menjadi wahana transformasi menuju keadilan (Mulyani, 2020). Di Indonesia, komitmen terhadap keadilan gender dalam pendidikan telah diamanatkan dalam berbagai regulasi, seperti Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan yang mewajibkan prinsip non-diskriminasi, dan diperkuat dalam Peta Jalan Pendidikan 2020-2035. DKI Jakarta, sebagai episentrum kemajuan dan keragaman, memiliki landscape pendidikan menengah swasta yang sangat variatif, mulai dari sekolah berbasis agama, nasional plus, hingga internasional. Variasi ini menawarkan ruang eksperimentasi tetapi juga berpotensi memunculkan kompleksitas dalam memaknai dan mengimplementasikan keadilan gender (Fithriyah & Sari, 2022).

Meski secara normatif kuat, berbagai studi menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih terjadi di lingkungan sekolah, termanifestasi dalam bias materi ajar, perbedaan perlakuan guru, stereotip dalam bimbingan karier, hingga kasus kekerasan berbasis gender (Kurniawati & Pratama, 2021; Sihombing, 2023). Pada sekolah swasta, dinamika ini semakin kompleks karena dipengaruhi oleh visi yayasan, tekanan pasar (orang tua sebagai konsumen), dan otonomi pengelolaan yang lebih besar. Penelitian terdahulu banyak berfokus pada kebijakan makro atau

pada sekolah negeri. Oleh karena itu, studi yang menyelidiki secara mendalam praktik inklusi dan keadilan gender di SMA swasta, khususnya di Jakarta, menjadi penting untuk mengisi kekosongan akademik dan memberikan rekomendasi yang kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain mixed methods eksplanatori sekuensial (Creswell & Plano Clark, 2023). Tahap pertama (kuantitatif) berfungsi untuk mengidentifikasi pola dan generalisasi awal, sementara tahap kedua (kualitatif) mendalamai dan menjelaskan mekanisme di balik pola tersebut.

A. Tahap Kuantitatif:

1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah guru SMA swasta di DKI Jakarta. Teknik multistage random sampling digunakan. Sampel pertama berupa 30 sekolah (10 berbasis agama umum, 10 nasional plus, 10 umum) dari lima wilayah kota administrasi. Dari setiap sekolah, diambil 5 guru dari berbagai mata pelajaran, total 150 responden.

2. Instrumentasi

Kuesioner tertutup mengukur tiga variable:

- a. Pengetahuan tentang konsep gender dan kebijakan inklusi (15 item, Alpha Cronbach 0.78).
- b. Persepsi terhadap praktik inklusi di sekolah (20 item, Alpha Cronbach 0.82).
- c. Dukungan terhadap kebijakan transformatif (10 item, Alpha Cronbach 0.75).

3. Analisis Data:

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji ANOVA untuk melihat perbedaan berdasarkan jenis sekolah dan latar belakang guru.

B. Tahap Kualitatif:

1. Pemilihan Kasus

Tiga sekolah dipilih dari hasil survei yang mewakili skor tertinggi, menengah, dan terendah pada skala persepsi inklusi, sekaligus mewakili tiga visi berbeda: Sekolah A (Agama), Sekolah B (Nasional Plus), Sekolah C (Umum).

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara Mendalam Semi-terstruktur: Dilakukan terhadap Kepala Sekolah (3 orang), Wakil Kesiswaan (3 orang), Guru (9 orang, 3 per sekolah), Konselor (3 orang), dan Perwakilan Siswa (6 orang, 2 per sekolah). Total 24 informan.
- b. Observasi Partisipan: Dilakukan di kelas, upacara, rapat OSIS, dan kegiatan ekstrakurikuler selama 10 hari observasi per sekolah.
- c. Analisis Dokumen: Menganalisis RPP, buku teks pilihan, tata tertib, majalah dinding, dan postingan media sosial sekolah.

3. Analisis Data Kualitatif

Data dianalisis secara tematik menggunakan model interaktif Miles et al. (2020) melalui proses kondensasi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

C. Integrasi Data dan Asumsi

Integrasi terjadi pada fase interpretasi, di mana temuan kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan mengkontekstualisasikan hasil kuantitatif. Asumsi penelitian yang dipegang adalah:

1. Partisipan memberikan informasi yang valid dan jujur.
2. Observasi tidak mengganggu dinamika alami sekolah.
3. Tiga sekolah kasus dapat memberikan gambaran yang memadai tentang fenomena. Triangulasi sumber dan metode dilakukan untuk meningkatkan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemaparan Data

1. Hasil Survei Kuantitatif

Sebanyak 68% guru menyatakan "setuju" bahwa keadilan gender penting di sekolah. Namun, hanya 42% yang merasa "sangat paham" dengan konsep PUG di pendidikan. Terdapat perbedaan signifikan ($p<0.05$) berdasarkan jenis sekolah: guru sekolah nasional plus memiliki skor pengetahuan dan persepsi positif tertinggi, diikuti sekolah umum, dan kemudian sekolah agama. Sebanyak 75% guru menyatakan tidak pernah mendapat pelatihan khusus gender.

2. Temuan Kualitatif Kurikulum

a. Formal

Integrasi bersifat sporadis dan bergantung pada inisiatif guru. Di Sekolah B, isu gender masuk dalam proyek mata pelajaran IPS dan Bahasa Inggris. Di Sekolah A, dibahas dalam konteks fiqh (hukum Islam) yang cenderung menegaskan perbedaan peran.

b. Tersembunyi

Sangat kuat. Pembina OSIS cenderung menyarankan laki-laki untuk posisi ketua. Ekstrakurikuler seperti robotik didominasi laki-laki, sasta dan paduan suara didominasi perempuan. Buku-buku di perpustakaan terkait kepemimpinan lebih banyak menampilkan figur laki-laki.

3. Temuan Kualitatif Budaya Sekolah

- a. Kepemimpinan: Kepala sekolah dan 80% posisi wakil kepala sekolah di ketiga sekolah adalah laki-laki.
- b. Interaksi dan Disiplin: Guru cenderung memanggil siswa laki-laki yang ribut, sementara perempuan yang ramai langsung disebut "tidak sopan". Pelanggaran seragam (rok terlalu pendek) pada siswi mendapatkan teguran lebih keras daripada pelanggaran pada siswa.
- c. Respons terhadap Kekerasan: Sekolah cenderung menangani kasus pelecehan verbal antarsiswa dengan pendekatan mediasi tanpa pemahaman akar masalah berbasis gender.

4. Faktor Pendorong & Penghambat

Pendorong utama adalah adanya guru muda yang berpikiran progresif dan akses informasi dari kurikulum internasional (di Sekolah B). Penghambat utama adalah:

- a. Norma Sosial dan Orang Tua: Tekanan dari orang tua yang khawatir isu gender akan "mengacaukan kodrat".
- b. Kurangnya Kapasitas: Pelatihan guru yang tidak memadai.
- c. Absennya Kebijakan Sekolah yang Eksplisit: Tidak ada Peraturan Sekolah yang secara tegas melarang diskriminasi gender dan mengatur mekanisme pengaduan.

B. Analisis

Temuan menggambarkan sebuah paradoks. Di satu sisi, ada pengakuan retoris (rhetorical commitment) terhadap pentingnya keadilan gender, terutama di sekolah dengan label "modern" (nasional plus). Di sisi lain, dalam praktik sehari-hari, sekolah justru menjadi situs reproduksi ketidakadilan melalui mekanisme kurikulum tersembunyi dan budaya yang bias. Otonomi sekolah swasta, yang seharusnya menjadi ruang untuk inovasi, dalam konteks ini justru dibajak oleh kepentingan konservatisme pasar (orang tua) dan ketidaksiapan sumber daya manusia. Keadilan gender dipersempit maknanya menjadi sekadar kesempatan yang sama untuk masuk klub sains, tanpa kritik terhadap struktur sosial yang membuat klub tersebut tidak menarik bagi banyak perempuan.

C. Diskusi dan Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

1. **Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya:** Temuan tentang kuatnya kurikulum tersembunyi sejalan dengan penelitian Connolly et al. (2019) dan Kurniawati & Pratama (2021). Namun, penelitian ini mengungkap bahwa di sekolah swasta, kurikulum tersembunyi juga dikomodifikasi; misalnya, citra sekolah "modern" dan "internasional" (seperti di Sekolah B) dipasarkan, tetapi transformasi nilai gender yang mendalam tidak

terjadi karena takut bertentangan dengan ekspektasi orang tua. Temuan tentang perbedaan berdasarkan jenis sekolah memperkuat studi Febrianto (2023) dan Dewi & Halim (2022), namun penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan tersebut lebih terletak pada wacana permukaan (lip-service) daripada pada praktik substantif.

2. **Implikasi Teoretis:** Penelitian ini memperkuat relevansi teori Reproduksi Sosial Bourdieu dalam konteks pendidikan gender di Indonesia. Sekolah swasta, sebagai field, mereproduksi modal budaya (cultural capital) kelas menengah perkotaan yang secara paradoks bisa jadi membawa wacana kesetaraan global sekaligus memelihara habitus patriarki lokal. Teori Interseksionalitas Crenshaw (2020) juga relevan untuk melihat bagaimana pengalaman ketidakadilan berbeda bagi siswi dari kelas sosial, agama, dan kemampuan yang berbeda.
3. **Implikasi Praktis: Diperlukan:** (a) Pengembangan Modul dan Pelatihan Mandiri yang kontekstual bagi guru dan tenaga kependidikan SMA swasta, tidak hanya tentang konsep, tetapi tentang pedagogi dan refleksi bias diri. (b) Review Kebijakan Sekolah (Tata Tertib, Kode Etik) untuk memastikan prinsip non-diskriminasi dan sanksi bagi pelecehan berbasis gender diatur secara eksplisit. (c) Kemitraan dengan Orang Tua melalui seminar dan dialog untuk membangun pemahaman bersama, mengurangi resistensi.
4. **Kontribusi Penelitian:** Kontribusi utama artikel ini adalah penyediaan analisis empiris yang komparatif dan mendalam tentang implementasi keadilan gender di berbagai jenis SMA swasta di wilayah metropolitan. Penelitian ini juga mengaitkan secara kritis antara otonomi sekolah swasta dengan tanggung jawabnya dalam mendidik warga negara yang egaliter, sebuah topik yang belum banyak dibahas dalam literatur pendidikan di Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi inklusi dan keadilan gender di SMA swasta DKI Jakarta masih berada pada tahap yang simbolis dan parsial. Meski terdapat kesadaran di tingkat wacana, prinsip-prinsip tersebut belum diinstitusionalisasi secara mendalam ke dalam struktur kurikulum, budaya, dan kebijakan sekolah. Ketimpangan justru terus direproduksi melalui kurikulum tersembunyi, praktik pedagogis yang bias, dan budaya organisasi yang maskulin. Otonomi sekolah swasta, dalam banyak kasus, belum dimanfaatkan untuk terobosan transformatif, melainkan justru tunduk pada tekanan pasar dan norma sosial konservatif. Dengan demikian, sekolah swasta dalam penelitian ini lebih berfungsi sebagai agen reproduksi ketimbang agen transformasi ketidakadilan gender.

Saran

1. Bagi Pemerintah (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta):

Mengembangkan panduan operasional dan indikator pencapaian keadilan gender di sekolah yang dapat diadopsi dan diadaptasi oleh sekolah swasta, dilengkapi dengan sistem monitoring sederhana. Menyelenggarakan pelatihan berjenjang dan berkelanjutan bagi guru dan kepala sekolah swasta, dengan melibatkan perguruan tinggi dan organisasi pakar gender. Memfasilitasi forum pertukaran praktik baik antar-SMA swasta untuk pembelajaran sejauh.

2. Bagi Sekolah dan Yayasan Penyenggara:

Melakukan audit gender internal secara partisipatif untuk mengidentifikasi bias dalam kurikulum, tata tertib, dan praktik sekolah. Menetapkan kebijakan anti-diskriminasi dan anti-pelecehan seksual yang jelas, beserta saluran pengaduan yang aman dan prosedur penanganannya. Mendiversifikasi narasi kepemimpinan dan keteladanan dalam semua kegiatan sekolah, termasuk mendorong partisipasi setara dalam semua ekstrakurikuler.

3. Bagi Penelitian Lanjutan:

Melakukan penelitian serupa dengan cakupan sampel yang lebih luas dan melibatkan perspektif orang tua secara mendalam. Meneliti efektivitas model-model intervensi spesifik (seperti klub kesetaraan gender di sekolah, program mentoring) dalam mengubah sikap dan

perilaku siswa. Melakukan studi longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang dari sekolah yang menerapkan prinsip inklusi gender terhadap pilihan karier dan sikap hidup alumninya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S., & Wijaya, C. (2021). Kapasitas guru dalam pembelajaran sensitif gender : Studi di SMA Negeri Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 27(1), 45-56.
- Arifin, Z., & Nisa, K. (2020). Bias gender dalam buku teks pelajaran sosiologi dan sejarah SMA di Indonesia. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 4(2), 123-145.
- Connolly, P., et al. (2019). The hidden curriculum of gender in primary schools. *Journal of Educational Research*, 112(3), 345-360.
- Crenshaw, K. (2020). *On intersectionality : Essential writings*. The New Press.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2023). *Designing and conducting mixed methods research* (4th ed.). Sage Publications.
- Dewi, P. S., & Halim, F. (2022). Wacana kesetaraan gender dalam kurikulum internasional di sekolah nasional plus Jakarta. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(2), 89-104.
- Febrianto, R. (2023). Interpretasi keagamaan dan wacana gender di sekolah swasta Islam : Studi fenomenologi di Jakarta Selatan. *Jurnal Studi Islam dan Gender*, 6(1), 78-95.
- Fithriyah, I., & Sari, M. (2022). Otonomi sekolah swasta dan tantangan implementasi pendidikan inklusif di DKI Jakarta. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 19(3), 210-225.
- Kurniawati, D., & Pratama, A. (2021). Stereotip gender dalam interaksi guru-siswa dan implikasinya terhadap partisipasi kelas. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 15(2), 134-150.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis : A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Mulyani, E. (2020). Sekolah sebagai arena reproduksi dan resistensi ketimpangan gender. *Jurnal Perempuan*, 25(4), 12-30.
- Sihombing, A. A. (2023). Kekerasan berbasis gender di lingkungan sekolah : Analisis kasus dan mekanisme pencegahan. *Jurnal Socius*, 9(1), 56-72.
- Unesco. (2019). *From access to empowerment : UNESCO strategy for gender equality in and through education 2019-2025*. UNESCO Publishing.